**Meneguhkan Islam *Wasathiyah* Melalui Pembudayaan Dialog Lintas Agama di Madrasah**

**Sigit Priatmoko**

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Jl. Airlangga No. 03 Sukodadi Lamongan

Email: [sigitpriatmoko@gmail.com](mailto:sigitpriatmoko@gmail.com)

***Abstract***

*This article was written with the aim of knowing a comprehensive picture of civilizing interfaith dialogue in madrasas that has not been done much. Even though in the midst of various and pluralistic realities of life like Indonesia, this is urgent to do. This is evidenced by the unpopular use of the multireligious and interreligious paradigms in educating religion. This paper seeks to provide an overview of the urgency of civilizing interfaith dialogue in madrasas as an early effort to strengthen the spirit wasathiyah in students.*

***Keywords:*** *Interfaith Dialogue, Wasathiyah Islam*

**Abstrak**

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui gambaran komprehensif mengenai pembudayaan dialog lintas agama di madarasah yang belum banyak dilakukan. Padahal di tengah realitas kehidupan beragam yang plural seperti Indonesia, hal ini *urgent* untuk dilakukan. Hal ini terbukti dengan belum populernya penggunaan paradigma multireligius dan interreligius dalam mendidikkan agama. Tulisan ini berupaya memberikan gambaran mengenai urgensitas pembudayaan dialog lintas agama di madrasah sebagai upaya dini untuk meneguhkan semangat *wasathiyah* dalam diri peserta didik.

**Kata Kunci:** *Dialog Lintas Agama, Islam Wasathiyah*

**Pendahuluan**

Banyaknya konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Budaya) yang terjadi di negeri ini, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mampu memahami, menyikapi, dan mengelola keragaman dan perbedaan yang dimiliki. Kasus pengerusakan rumah ibadah, kasus pengusiran kelompok Syi’ah di Sampang, Madura dan kasus pemvonisan sesat terhadap Jama’ah Ahmadiyah menjadi contoh representatif hal ini. Keragaman yang dibanggakan justru menjadi bumerang bagi Indonesia.

Selain itu, sampai dengan hari ini, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila masih sebatas jargon atau semboyan semata. Belum ada semangat dari bangsa Indonesia untuk mengamalkan dan mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata dari kenyataan ini adalah ketika sentimen agama muncul ke permukaan, serta merta direspon oleh masyarakat dengan reaksi yang berlebihan. Ironisnya, pemerintah dan aparat penegak hukum terkesan setengah hati menyelesaikan konflik-konflik SARA yang terjadi. Bahkan dalam beberapa kasus, oknum aparat pemerintah dan pengegak hukum justru menjadi bagian dari konflik.

Kondisi di atas diperparah dengan semakin merebaknya isu fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme di tengah masyarakat. Munculnya isu-isu ini tak lepas dari keberagamaan beberapa masyarakat Indonesia yang masih tekstualis, eksklusif, dan superior. Sikap demikian inilah yang semakin mempersulit dialog lintas agama yang sejak beberapa tahun lalu digalakkan oleh pemerintah (Kementerian Agama).

Jika menilik konflik-konflik SARA yang telah terjadi, terutama yang berlatar belakang agama, umat Islam menjadi pihak yang paling banyak terlibat. Bahkan, menjadi aktor dan sutradara di dalamya. Sebut saja misalnya kasus diskriminasi kelompok Syi’ah Sampang sebagaimana disebutkan di atas. Kelompok umat Islam ini harus mengalami perlakuan diskriminatif karena tidak sepaham dengan aliran *mainstream.* Kasus ini berdampak pada terusirnya kelompok minoritas Syiah dari tempat tinggalnya, Desa Karangganyam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Kasus tersebut bukanlah kasus yang terjadi secara tiba-tiba. Praktik kekerasan yang dialami oleh komunitas Syiah di Sampang telah terjadi sejak tahun 1980. Terjadi rentetan kekerasan yang berlangsung lama hingga memuncak pada penyerangan di bulan Agustus 2012, yang memakan korban jiwa dan harta benda.[[1]](#footnote-1)

Kasus lain yang tak kalah mencengangkan adalah diskriminasi terhadap rumah ibadah. Terdapat banyak faktor yang memicu permasalahan ini. Misalnya diskriminasi terhadap Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Banda Aceh. Umat Kristiani harus berjuang keras hanya untuk mendirikan rumah ibadah. Hal itu tidak hanya karena Aceh memiliki peraturan khusus tentang pembangunan rumah ibadah (Pergub No. 25 tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah) dari peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (PBM 2 Menteri), tetapi juga, secara sosiologis, terdapat gerakan organisasi Islam yang berupaya menegakkan Syariat Islam, termasuk mencegah kristenisasi yang mereka percayai bagian dari tujuan pembangunan gereja.[[2]](#footnote-2)

Permasalahan serupa tapi menyerang umat yang berbeda terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Satu di antaranya adalah proses pembangunan Masjid Nur Musafir yang dihiasi polemik. Menurut laporan Reynold Uran dan Firmansyah Dahlan Mara, polemik pembangunan Masjid Nur Musafir lahir karena kecurigaan masyarakat terhadap proses pemenuhan syarat administrasi yang dimanipulasi serta upaya islamisasi dengan kehadiran masjid dalam masyarakat yang mayoritas Kristen. Kecurigaan semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang tidak mengindahkan protes warga. Dalam hal ini, upaya mempertemukan pihak yang berkonflik mengalami jalan buntu. Begitu juga sikap pemerintah justru mengakibatkan lemahnya potensi ruang-ruang di masyarakat untuk mengkonfirmasi isu dan kecurigaan di antara mereka.[[3]](#footnote-3)

Berangkat dari fakta di atas, ternyata permasalahan intoleransi tidak hanya terjadi antar-pemeluk agama, melainkan juga intra-agama. Artinya, ketegangan antar-kelompok juga terjadi dalam satu agama. Terlepas apapun motif di baliknya, kenyataan ini tentu merupakan sebuah ironi. Agama yang semestinya menjadi tali pengikat, jembatan penghubung, dan lem perekat persaudaraan antara manusia justru berbalik fungsi menjadi pemecah belah persatuan.

Berangkat dari permasalahan ini, maka diperlukan sebuah upaya yang konkrit, sistematis, dan massif untuk memahamkan dan menanamkan sikap toleransi. Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan nantinya mampu mengelola keragaman yang dimiliki seoptimal mungkin untuk membangun peradaban bersama tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan budaya. Satu di antara upaya tersebut adalah melalui jalur pendidikan yang mengedepankan semangat toleransi dan kebersamaan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting di sini. Ia merupakan ujung tombak untuk melahirkan generasi Islam masa depan yang benar-benar mampu menampilkan Islam *rahmatan lil ‘alamin*.

Madrasah sebeagai representasi pendidikan Islam merupakan media yang tepat untuk menyemai generasi muslim yang moderat di masa depan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di madrasah haruslah selaras dan sejalan dengan prinsip-prinsip, nilai, dan ajaran fundamental Islam, terutama dalam hal semangat kesetaraan, kemanusiaan, dan toleransi. Penyelenggaraan pendidikan di madrasah yang demikian akan melahirkan kesadaran akan pluralitas dan multikulturalitas yang merupakan dua hal tak terpisahkan dari kehidupan. Muaranya, pintu dialog lintas budaya dan agama yang hari ini kian terdekonstruksi karena menguatnya kelompok-kelompok fundamentalis dan tekstualis semakin terbuka lebar.

Dialog sebagai aktivitas yang terlembagakan di Indonesia telah dimulai sejak 1960-an, dipromosikan dengan gencar oleh pemerintah; dilakukan pada tingkat masyarakat; dan juga dikembangkan dalam dunia akademis. Sementara dialog telah sering dilakukan dan banyak gagasan mengenai dialog dikembangkan, namun kajian mengenai praktik dialog tersebut belum jamak.[[4]](#footnote-4) Padahal melalui dialog, stigma negatif terhadap Islam sebagai agama kekerasan dan intoleran dapat direduksi. Sebagai gantinya, yang tampak nantinya adalah wajah Islam yang penuh *rahmah.*

Berangkat dari titik ini, diperlukan sebuah kajian yang komprehensif dalam rangka merumuskan *grand design* pengarusutamaan dialog di lingkungan pendidikan. Kertas kerja ini bermaksud menawarkan desain pembudayaan dialog agama di lingkungan madrasah dalam rangka meneguhkan Islam wasathiyah di Indonesia.

**Sekilas Potret Permasalahan Pluralitas di Indonesia**

Akhir-akhir ini, keberagaman yang dari dulu dibanggakan oleh bangsa Indonesia terancam menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Serentetan peristiwa kemanusiaan berlatar belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pluralitas menyimpan potensi untuk menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Dampak dari konflik-konflik tersebut adalah menjadi terkotak-kotaknya masyarakat berdasarkan identitas masing-masing. Sekat di antara mereka semakin tebal dan menguat karena hembusan isu-isu SARA oleh beberapa kelompok terutama di tahun-tahun politik.

Satu di antara problematika pluralitas yang kerap kali memantik benturan di masyarakat adalah pluralitas agama. Sebagai negara kesatuan, sejatinya keberagaman agama di Indonesia merupakan hal yang wajar. Justru keragaman tersebut merupakan potensi dan kekayaan yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Sejarah mencatat, koeksistensi umat beragama di nusantara juga sudah terjalin sejak lama. Namun yang terjadi akhir-akhir ini adalah sebaliknya, keragaman agama belum sepenuhnya dapat diterima dan dikelola dengan bijak oleh bangsa Indonesia. Kasus-kasus penodaan agama, perusakan rumah ibadah, kerusuhan, penyesatan, pengusiran, marginalisasi, stereotype, persekusi dan berbagai tindakan diskriminatif lainnya masih menghantui umat beragama minoritas di negeri ini.

Secara umum, hubungan antaragama di Indonesia berjalan baik di hampir seluruh wilayah Indonesia, meskipun tidak bisa dipungkiri masih ada beberapa masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah Reformasi 1998, ada sumber-sumber ketegangan dalam hubungan antarkomunitas agama, yang tak jarang berubah menjadi kekerasan. Kekerasan komunal ini melibatkan komunitas-komunitas beda agama dalam skala besar, seperti beberapa kasus yang terjadi di sekitar 1998.[[5]](#footnote-5) Namun akhir-akhir ini, ketegangan hubungan antarumat beragama mengarah pada tiga persolan, yaitu penyesatan, perusakan rumah ibadah, dan penodaan agama. Ketiga persoalan ini pada beberapa kasus mengarah pada kekerasan baik komunal maupun individual. Seperti terlihat pada konflik komunal di Maluku, Maluku Utara, dan Poso, konflik Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan konflik pembangunan Gereja Yasmin di Bogor.

UU Pencegahan dan Penodaan Agama yang lahir pada tahun 1965, tetapi terus dipakai hingga kini ketika masa sudah berubah dan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2010, semakin membuka peluang terjadinya konflik antarumat beragama. Hal ini juga diperparah oleh penegakan hukum kepada para pelaku kekerasan yang terkesan lambat.

Selain itu, menguatnya identitas agama akhir-akhir ini juga menjadi faktor penyumbang konflik pluralitas agama di Indonesia. Menguatnya identitas keagamaan sejatinya adalah gejala global yang tak harus bermakna negatif, dan sudah lazim dianggap sebagai fakta yang harus diterima; yang menjadi keresahan adalah ketika ia menimbulkan ketegangan yang bahkan dalam makin banyak kasus menjadi kekerasan—lebih jauh lagi, ketika ia tak direspon dengan baik.[[6]](#footnote-6) Penguatan identitas keagamaan ini tak lepas dari semakin menjamurnya pemahaman fundamentalis dan tekstualis di masyarakat. Pemahaman yang demikian ini melahirkan sikap merasa paling benar, atau dalam bahasa yang lebih populer disebut dengan klaim kebenaran (*truth claim*). Buntut dari sikap tersebut adalah model beragama masyarakat hari ini menjadi semakin kaku, keras, superior, dan kian apriori terhadap keberagamaan umat atau kelompok lain yang berbeda.

Munculnya konflik pluralitas agama di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, disebabkan oleh masih kurangnya penerimaan dan penghargaan keragaman dan upaya bekerja bersama orang atau kelompok lain demi mencapai kebaikan bersama (pluralisme). Meski memiliki akar sejarah yang panjang, pluralisme hari ini justru kian asing di tengah umat beragama Indonesia. Hal ini semakin didukung oleh sikap para pemuka agama yang terkesan kurang memberikan ruang bagi pluralisme untuk berkembang. Bahkan, ada semacam “alergi” terhadap konsep satu ini. Hal ini ditunjukkan oleh terbitnya fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama.

Sikap MUI ini tentu sungguh disayangkan. Pemaknaan terhadap pluralisme yang sempit seperti ini telah terbukti mengakibatkan semakin meningkatnya intoleransi di tengah kehidupan beragama akhir-akhir ini. Dimensi teologis dalam kehidupan beragama nyang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, justru menjadi bahan bakar perang argumen di berbagai media sosial. Dampaknya bisa ditebak, sentimen keagamaan di masyarakat menunjukkan tren peningkatan. Fatwa MUI yang kontroversial ini kemudian dikebiri oleh sejumlah pihak untuk mendiskriminasi kelompok keagamaan tertentu, seperti Ahmadiyah dan Syi’ah, yang bahkan tak jarang memunculkan kekerasan yang memakan korban.

Sejak peristiwa aksi 411, kemudian dilanjutkan dengan aksi 212 pada tahun 2016 silam, sikap “alergi” terhadap pluralisme menunjukkan tren peningkatan. Masyarakat bahkan semakin termotivasi untuk melakukan aksi-aksi yang serupa. Hal ini ditunjukkan oleh rangkaian aksi pasca 212, seperti aksi 313 dan aksi 115. Selain itu, tingginya motivasi dan kebanggaan umat Islam atas aksinya tersebut ditunjukkan pula oleh pemberian sebutan “alumni” bagi mereka yang pernah mengikuti aksi 212. Istilah alumni ini menunjukkan bahwa akan dilakukan aksi-aksi serupa di waktu yang akan datang sebagai bentuk “reuni”, seperti yang dilakukan pada 2 Desember 2017.

Dampak nyata dari aksi 212 dapat dilihat di media-media sosial. Sejak bergulirnya aksi tersebut dan aksi-aksi serupa setelahnya, terjadi perang argumen antar *netizen* di berbagai media sosial. Hal yang paling banyak diperdebatkan adalah mengenai penodaan agama. Perang argumen ini kemudian berujung pada merebaknya hoaks, ujaran kebencian, hujatan, cacian, bahkan sampai mengarah pada persekusi tidak hanya terhadap umat beragama lain, namun juga terhadap kelompok lain yang berbeda dalam satu agama. Hal ini semakin mengkhawatirkan di tengah suhu perpolitikan nasional yang kian meningkat menjelang pemilu presiden tahun depan.

**Konsepsi Dialog Lintas Agama**

Meski memiliki akar historis yang panjang, namun dialog lintas agama di Indonesia baru populer setelah mendapatkan bentuk yang lebih terorganisir dan institusional sejak tahun 1969. Adalah Prof. Dr. Mukti Ali, Menteri Agama periode 1971-1978, yang berjasa membangun fondasi dialog lintas agama di Indonesia. Akan tetapi pada masa Orde Baru waktu itu, istilah dialog belum populer, sebagai gantinya adalah istilah toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pada masa ini, banyak dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat hubungan antar-agama baik oleh pemerintah melalui Departemen Agama (Depag), individu-individu tokoh, maupun masyarakat melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Selain itu, Depag kemudian juga membentuk wadah-wadah dialog seperti Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama (WMAUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali-wali Gereja se-Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi).[[7]](#footnote-7)

Sejatinya, dialog lintas agama telah bermula semenjak perjumpaan agama-agama di tanah nusantara. Kedatangan agama baru senantiasa dilanjutkan dengan pertemuan antar iman atau agama yang sudah ada sebelumnya. Perjumpaan tersebut telah mengantarkan para pemeluk agama pada dialog dengan dataran yang berbeda-beda. Bahkan tak jarang, dialog yang terjadi telah mencapai dataran teologis. Terjadinya dialog inilah yang di kemudian hari membentuk konstruksi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia. Hingga kini, nuansa dialog lintas agama masih sangat kental terasa di berbagai wilayah Indonesia. Hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain telah menjadi suatu hal yang wajar dan, pada titik tertentu, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama.

Namun, di berbagai wilayah yang berbeda justru terjadi sebaliknya. Jangankan berdialog dan bekerjasama, untuk bertoleransi kepada umat agama lain saja masih terasa sangat mahal. Hal ini yang kemudian mendapat perhatian serius dari pemerintah Orde Baru. Demi menjaga stabilitas negara dalam rangka melancarkan program-program pembangunan nasional, pemerintah berupaya sekuat tenaga membimbing dan membina umat beragama untuk hidup rukun, toleran, dan damai dengan umat agama yang berbeda. Upaya pemerintah ini tertuang dalam program yang disebut trilogi kerukunan, yaitu (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama; dan (3) kerukunan umat beragama dengan pemerintah.[[8]](#footnote-8)

Dialog lintas agama dalam bahasa sederhana dapat dimaknai sebagai perjumpaan para pemeluk agama yang berbeda untuk bersama-sama berbagi pengalaman beragama, permasalahan kehidupan bersama, dan berupaya menjalin kersama kehidupan. Terdapat ungkapan menarik yang dikemukakan oleh Dewan Gereja Sedunia (*World Council of Chruches*/WCC) pada tahun 1971 mengenai dialog;

*Dialogue begins when people meet. Dialogue depends upon mutual understanding and mutual trust. Dialogue makes it possible to share in service. Dialogue becomes the medium of authentic witness*.

Sejalan dengan ungkapan tersebut, J.B. Banawiratma dkk.[[9]](#footnote-9) memberikan konsepsi yang menarik terhadap dialog. Dialog diberikan makna seluas-luasnya, bahkan ketika terjadi pejumpaan antar pemeluk agama, terlepas apa isi percakapannya, hal ini disebut dialog. Dalam hal ini dialog tidak dimaknai secara rigid dan formal. Momen dialog dapat dilihat *dari bawah*, dari perjumpaan dalam realita hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, dialog dapat dilihat dalam tujuh dataran kehidupan.

*Pertama,* dialog kehidupan. Dialog ini terjadi dalam komunitas umat beragama yang menghadapi kenyataan hidup bersama. Anggota komunitas, baik laki-laki maupun perempuan yang berbeda agama saling mengenal satu sama lain. Mereka mempunyai keprihatinan yang sama terhadap isu-isu sosial bersama seperti kemiskinan, pendidikan, kebersihan, wabah penyakit, pekerjaan dan sebagainya. Mereka berbagi suka maupun duka tanpa tersekat oleh identitas agama. Dalam dialog ini, komunita agama hidup berdampingan dengan semangat kerukunan, pertemanan, dan persudaraan.

*Kedua,* analisis sosial dan refleksi etis kontekstual. Kelompok umat beragama yang berbeda-beda tersebut mencoba mengartikan kenyataan hidup yang selama dialami dan membuat pertimbangan etis. Analisis sosial ini tidaklah bebas nilai. Artinya, komunitas lintas agama tersebut menyepakati nilai-nilai untuk diperjuangkan bersama. Nilai-nilai tersebut misalnya keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan sebagainya.

*Ketiga,* studi tradisi-tradisi agama. Para anggota komunitas pada dataran dialog ini berusaha menggali tradisi keimanan masing-masing. Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa pilihan etis selalu tak lepas dari sumber keimanan yang dipegangi oleh setiap umat beragama. Pada dataran ini, kepedulian manusiawi yang diikuti analisis sosial dan pertimbangan etis secara eksplisit disadari sebagai kepedulian iman. Pertemuan tradisi-tradisi agama ini akan melahirkan sebuah nilai-nilai yang disepakati dan dipegangi bersama.

*Keempat,* dialog antarumat beragama: berbagi iman dalam level pengalaman. Umat beragama pada level dialog ini saling berbagi pengalaman dalam beriman masing-masing. Mereka berbagi pengalaman do’a, pengalaman kontemplasi, dan pengelaman dalam mencari dan menemukan Tuhan. Melalui dialog ini mereka akan semakin memiliki kekayaan pengalaman spiritual. Sehingga dapat merasakan pengalaman spiritual yang dialami oleh pemeluk agama lain. Hal ini penting untuk memupuk kesalingpengertian, penerimaan, dan pemahaman terhadap sesama.

*Kelima,* dialog antarumat beragama: berteologi lintas agama. Hubungan antaragama yang jujur dan terbuka memerlukan landasan teologis yang terbuka pula. Dalam rangka mengembangkan teologi yang terbuka, umat beragama hendaknya tidak hanya berpikir tekstual tapi juga kontekstual. Dengan demikian, umat beragama dituntut untuk melakukan komunikasi intertekstual dan interkontekstual secara kritis. Sehingga pesan-pesan ilahi yang disampaikan melalui teks dapat didialogkan dengan realitas kehidupan yang sedang dihadapi. Pun demikian dengan pesan-pesan serta kenyataan hidup dapat diteguhkan melalui dialog dengan teks.

*Keenam,* dialog aksi. Umat beragama−apapun itu−tidak dapat menolak kenyataan bahwa mereka merupakan bagian dari sistem kehidupan dan saling terhubung dengan umat beragama yang berbeda. Oleh karenanya, dialog antarumat beragama harus menyentuh masalah-masalah sosial dan mengarah pada keterlibatan kemasyarakatan. Dialog aksi akan mengantarkan umat lintas agama menjadi komunitas yang transformatif dan dialogis. Membangun harmoni kehidupan beragama tanpa disertai kepedulian bersama untuk mengolah konteks sosial yang ada hanya akan melahirkan harmoni yang palsu dan tanpa makna. Harmoni yang demikian ini hanya berada di permukaan semata, belum menyentuh jantung kehidupan beragama.

*Ketujuh,* dialog intraagama. Setelah melalui beragam dialog yang telah dipaparkan di depan. Umat beragama kembali kepada imannya masing-masing. Mereka melakukan dialog dengan keyakinan mereka. Dialog ini berupa melakukan otokritik terhadap keberimanan dan pengamalan ajaran-ajaran agama dalam hubungannya dengan umat agama lain yang selama ini dilakukan. Sehingga umat beragama menjadi orang-orang beriman yang lebih baik secara personal dan komunal. Semakin mendalam perjumpaan dengan keyakinan lain, maka semakin mendalam pula perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam menghidupi iman dan agama.

**Islam Wasathiyah dan Dialog Lintas Agama**

Islam wasathiyyah menjadi topik hangat perbincangan akhir-akhir ini. Bahkan di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) memunculkan *term* baru yang senada yaitu Islam Nusantara. Kedua *term* ini meskipun tampak berbeda namun pada dataran substansi memiliki persamaan. Yakni menghendaki Islam yang ramah dan penuh cinta kasih.

Istilah Islam wasathiyah muncul akibat kegelisahan para pemikir muslim atas permasalahan yang sedang dihadapi umat Islam dalam beberapa dasawarsa terakhir. Permasalahan tersebut di antaranya adalah semakin massifnya fundamentalisme di tengah umat Islam yang berakibat pada bermunculannya separatisme, radikalisme, terorisme, dan anarkisme dengan mengatasnamakan Islam.

Diharapkan dengan dikenalkannya konsep Islam wasatiyah, umat Islam akan memiliki pemahaman yang benar atas agamanya. Islam wasathiyah atau moderat mengedepankan kontekstualisasi sekaligus memperhatikan aspek tujuan moral dan etis, berkeyakinan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespons perubahan zaman yang semakin kompleks. Lain halnya dengan Islam puritan lebih mengedepankan kekuatan teks sehingga terkesan kaku dalam menerapkan hukum.[[10]](#footnote-10)

Karakteristik Islam wasathiyah dapat dilihat dari empat hal yaitu; *pertama*, dalam akidah. Ciri-ciri yang tampak adalah akidah Islam yang serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan parodaksal, abadi, dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. *Kedua*, dalam akhlak. Moderasi Islam dalam Akhlak menekankan keseimbangan antara orientasi kebendaan dan kerohanian. *Ketiga*, dalam ibadah dan muamalah. Islam tampil sebagai ajaran yang moderat. Baik ibadah dan muamalah diamalkan sesuai dengan proporsi yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak berlebih-lebihan. *Keempat*, kepribadian Rasulullah. Rasulullah adalah seorang yang lemah lembut hati, merasa sedih sekali melihat masyarakatnya terjerumus dalam kehancuran. Rasulullah juga sederhana dalam makan, minum, tidur, berpakaian, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dalam beribadah.[[11]](#footnote-11)

Ibnu ‘Asyur memberikan dua makana terhadap kata ”*wasath*.” *Pertama*, menurut etimologi, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. *Kedua*, menurut terminologi bahasa, *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.[[12]](#footnote-12)

*Wasathiyah* atau yang moderasi adalah salah satu karakteristik Islam yang sekaligus merupakan nilai fundamental dalam Islam. Islam yang moderat menghendaki dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti memahami Islam menggunakan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah. Radikal dalam arti memaknai Islam secara tekstualis sehingga menghilangkan fleksibilitas ajarannya. Akibatnya wajah Islam yang tampil adalah wajah yang kaku dan tidak mampu membaca realitas kehidupan.

Sikap *wasathiyah* Islam adalah satu sikap penolakan terhadap ekstremisme dalam bentuk kezaliman dan kebatilan. Ia tidak lain merupakan cerminan dari fitrah asli manusia yang suci yang belum tercemar pengaruh-pengaruh negatif.[[13]](#footnote-13) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai *wasathiyah* dalam Islam meliputi; (1) tengah-tengah (*tawasuth*) yakni anti pada ekstremisme, (2) seimbang (*tawazun*) yakni mengamalkan segala ajaran Islam dengan seimbang dan tidak berlebih-lebihan, (3) toleran (*tasammuh*) yakni menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan pemahaman kepada orang lain, dan (4) tegak lurus (*i’tidal*) yakni tegak, tegas, dan berani melakukan *amar mma’ruf nahiy munkar*.

Berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas bahwa Islam wasathiyah adalah Islam yang penuh cinta kasih dan menjunjung tinggi perdamaian sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, Islam yang ramah terhadap perbedaan. Termasuk dalam hal ini adalah perbedaan keyakinan. Sehingga dengan sendirinya dapat disimpulkan pula bahwa Islam wasathiyah menentang bahkan mengecam keras diskriminasi, *stereotype*, marginalisasi, ujaran kebencian, dan berbagai kezaliman lainnya terhadap pemeluk keyakinan yang berbeda.

Melalui keempat prinsipnya, Islam wasathiyah menegaskan diri sebagai Islam yang akomodatif terhadap dialog lintas agama dan keyakinan. Sepanjang hal itu dilakukan dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan untuk sesama. Sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Rasulullah di Madinah. Rasulullah tidak segan memberikan perlindungan dan menyetarakan kedudukan kaum Yahudi dan Kristen dengan kaum Muslimin. Bahkan mereka juga diberi hak suara untuk berpendapat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini membuktikan bahwa Islam memiliki watak kosmopolitan sesuai dengan visinya yakni menebar rahmah ke semesta alam (*rahmatan lil’alamin*).

**Strategi Kulturalisasi Dialog Lintas Agama di Madrasah Ibtida’iyah**

Dalam rangka membumikan Islam yang moderat (*wasathiyah*) di madrasah, diperlukan strategi yang tepat agar tidak terjadi resistensi di tengah peserta didik. Satu di antara strategi tersebut adalah melalui kulturalisasi dialog lintas agama. Melalui strategi ini, peserta didik akan terbiasa bertemu dengan berbagai keyakinan yang berbeda. Mereka akan belajar memahami perbedaan di sekitar mereka. Sehingga akan membangun sikap toleran di dalam diri mereka.

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa ada tujuh bentuk dialog yang dapat dikembangkan, yaitu dialog kehidupan, analisis sosial dan refleksi etis kontekstual, studi tradisi-tradisi agama, dialog antarumat beragama: berbagi iman dalam level pengalaman, dialog antarumat beragama: berteologi lintas agama, dialog aksi, dan dialog intraagama. Namun karena yang menjadi lokus pembicaraan di sini adalah peserta didik di tingkat madrasah ibtida’iyah, maka tentu dibutuhkan penyederhanaan terhadap bentuk-bentuk dialog tersebut. Berikut akan diuraikan penyederhanaan bentuk-bentuk dialog lintas agama agar relevan dengan karakteristik peserta didik madrasah ibtida’iyah.

*Pertama,* dialog kehidupan. Pada bentuk ini, peserta didik dikenalkan dengan nilai-nilai universal dari berbagai agama selain yang dianut mereka. Hal ini bertujuan untuk memahamkan bahwa hidup mereka tidak dapat dilepaskan dari orang lain,. Bahwa keragaman agama merupakan realitas yang pasti mereka temui dan hadapi dalam kehidupan. Sehingga ketika mereka harus hidup bersama dengan umat beragama yang berbeda, mereka tidak lagi “latah” dan kaget.

*Kedua,* analisis sosial dan refleksi etis kontekstual. Peserta didik diajak untuk berpikir kritis tentang realitas kontekstual kehidupan sosial yang plural, kemudian merumuskan nilai-nilai etis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pluralisme dan multikulturalisme menemukan relevansinya. Kedua sikap ini harus ditumbuhkan di lingkungan madrasah. Agar ke depan peserta didik tidak menjadi umat Islam yang latah dan menyadari sepenuhhnya bahwa pluralitas merupakan kenyataan hidup yang tak terelakkan.

*Ketiga,* studi tradisi-tradisi agama. Pada bentuk ini peserta didik diajak untuk menelaah tradisi-tradisi keagamaan yang mereka lakukan. Kemudian mereka mencari hikmah dari setiap tradisi tersebut. Pendidik berperan memfasilitasi dan mengarahkan peserta didik. Melalui strategi ini peserta didik akan lebih memahami mengapa mereka melakukan tradisi-tradisi keagamaan itu. Kesadaran akan hikmah di balik setiap tradisi akan mengantarkan peserta didik pada pemahaman beragama yang benar.

*Keempat,* dialog antarumat beragama: berbagi iman dalam level pengalaman. Penanaman sikap moderat dan kesadaran akan realitas kehidupan yang plural tidak cukup hanya dilakukan melalui pemaparan teori dan konsep. Pengalaman praktis harus dilakukan. Pada level dialog keempat ini, peserta didik dipertemukan dengan umat beragama lain kemudian saling berbagi pengalaman dalam beragama. Dialog ini akan menumbuhkan *awareness* terhadap keyakinan orang lain.

*Kelima,* dialog antarumat beragama: berteologi lintas agama. Pendekatan pendidikan agama yang hanya menggunakan paradigma monoreligious perlu diubah menjadi multireligius dan interreligius. Hal ini karena pendekatan monoreligius akan mengakibatkan peserta didik “buta” pada kenyataan pluralitas keagamaan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, pembelajaran teologi harus diupayakan mengakomodasi nilai-nilai universal yang terkandung dari berbagai agama. Lebih-lebih pada isu-isu sosial dan kemanusiaan yang merupakan domain kerjasama lintas agama. Mengenai hal ini, perlu adanya rombakan kurikulum pendidikan agama di mardrasah di samping model pembelajaran. Selain itu, sikap terbuka dari para guru dan wawasan yang luas tentang pluralitas juga sangat diperlukan.

*Keenam,* dialog aksi. Dialog agama harus menyentuh wilayah-wilayah sosial dan nilai-nilai universal yang menjadi *common word/kalimatun sawa* dari setiap agama. Selain itu, dialog harus pula mengarah pada upaya menciptakan keterlibatan aktif masyarakat. Umat beragama tidak bisa mengelakkan diri bahwa mereka merupakan bagian dari konteks sosial dan politik. Dinamika dan dialektika akan selalu menyertai dalam kehidupan mereka. Kesadaran demikian ini perlu ditumbuhkan sejak dini, terutama sejak di bangku sekolah. Madrasah sebagai wadah pendidikan harus memfasilitasi penumbuhan kesadaran ini melalui kegiatan-kegiatan baik ko-kurikuler maupun ektra kurikuler yang mampu menjembatani peserta didik untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan umat agama lain. Isu-isu seputar keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, ekonomi, budaya, dan pendidikan dapat menjadi media untuk menumbuhkan kesadaran ini.

*Ketujuh,* dialog intraagama. Setelah peserta didik mengalami dialog lintas agama, peserta didik diajak kembali kepada keimanan masing-masing. Upaya ini merupakan bentuk refleksi dan otokiritik terhadap output keimanan yang selama ini mereka alami. Kritik terhadap penghayatan keimanan ini dapat berwujud peneguhan atau teguran. Peneguhan terhadap keimanan dan teguran terhadap perilaku pribadi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini.

**Simpulan**

Berbagai konflik kemanusian berlatar belakang agama yang marak terjadi di dunia termasuk di Indonesia antara lain disebabkan oleh pengabaian dan penutupan mata umat beragama pada realitas keberagaman yang melingkupi hidup mereka. Umat Islam tak luput dari hal ini. Akhir-akhir ini kecenderungan fanatisme dan semangat primordialisme menunjukkan tren menguat di tengah umat Islam. Sikap demikian itulah yang kemudian melahirkan pemahaman agama yang fundamentalistik, tekstualis, dan formalistik. Sehingga pada akhirnya akan semakin mempermudah meledaknya konflik-konflik sosial-keagamaan yang motif utamanya adalah untuk membela dan memaksakan pemahaman suatu kelompok kepada kelompok lain.

Pada titik inilah diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk meneguhkan prinsip moderat/*wasathiyah* dalam Islam. Satu di antara strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan kesadaran akan pluralitas dan multikultur baik dalam hal agama maupun budaya. Kesadaran ini dapat ditumbuhkan antara lain melalui kulturalisasi dialog lintas agama di madrasah. Dialog lintas agama akan memberikan pengalaman autentik dan mendalam kepada peserta didik tentang nilai-nilai luhur yang juga terkandung dalam ajaran agama lain. Pendekatan demikian akan membuat peserta didik bersikap terbuka sekaligus kritis dalam beragama. Sikap ini akan semakin mengokohkan semangat *wasathiyah* dalam diri mereka.

**Daftar Pustaka**

Ahnaf, Mohammad Iqbal, dkk. *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya. Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. 2015.

Bagir, Zainal Abidin, dkk. *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan. 2011.

Banawiratma, J.B., dkk. *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Mizan Publika. 2010.

Chairudin, Mochamad. *Aspek Pengembangan Internalisasi Nilai Moderasi Islam Pada Santri Studi Kasus Di Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik*. no. April (2018).

Hasanah, Iva dan Abdul Fatah. Suara Simpang Kasus Sampang: Konflik Sunni-Syiah Perspektif Perempuan, *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*, (Ed). Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada. 2015.

Hefner, Robert W. dan Ihsan Ali-Fauzi, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori dan Advokasi*, (Program Studi Agama dan Lintas Budaya. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. 2014.

Madjid, Nurcholis, dkk. *Fiqih Lintas Agama:Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis.* (Ed). Cet. VI. Jakarta: Paramadina. 2004.

Nur, Afrizal Nur and Mukhlis Lubis, “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa at-Tanwîr Dan Aisar at-Tafâsîr)” 4, no. 2 (2015): 205–25.

1. Iva Hasanah dan Abdul Fatah, Suara Simpang Kasus Sampang: Konflik Sunni-Syiah Perspektif Perempuan, *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*, (Ed), (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, 2015), hh. 243 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk., *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2015), hh. vi [↑](#footnote-ref-2)
3. Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk., *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2015), hh. vii [↑](#footnote-ref-3)
4. J.B. Banawiratma, dkk. Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hh. vii [↑](#footnote-ref-4)
5. Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2011), hh. 12 [↑](#footnote-ref-5)
6. Robert W. Hefner dan Ihsan Ali-Fauzi, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori dan Advokasi*, (Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2014), hh. 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurcholis Madjid, dkk. *Fiqih Lintas Agama:Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis.* (Ed). Cet. VI. (Jakarta: Paramadina, 2004), hh. 198. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nurcholis Madjid, dkk. *Fiqih Lintas Agama,* hh. 199 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mega Hidayati J.B. Banawiratma, Zainal Abidin Bagir, Fatimah Husein, Suhadi Cholil, Novita Rakhmawati, Ali Amin Budi Asyhari, *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan Dan Praktik Di Indonesia*, 2010. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ismail, “Pesantren, Islam Moderat, Dan Etika Politik Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” no. April (2018): 585–94. [↑](#footnote-ref-10)
11. Chairudin, “ASPEK PENGEMBANGAN INTERNALISASI NILAI MODERASI ISLAM PADA SANTRI Studi Kasus Di Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik.” [↑](#footnote-ref-11)
12. Nur and Lubis, “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa at-Tanwîr Dan Aisar at-Tafâsîr).” [↑](#footnote-ref-12)
13. Nur and Lubis. [↑](#footnote-ref-13)